



PENELITIAN
UNTUK HUKUM,
KEADILAN, DAN
KEMASLAHATAN UMAT

ILMU | INTEGRITAS | MANFAAT
UNTUK NEGERI

ROADMAP PENELITIAN 2025 – 2028

PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

*"Integratif, Inovatif,
dan Berdampak
untuk Negara Berkeadilan"*

*UIN Malang
Kampus Peradaban*



KONSTITUSI
DEMOKRASI
HAM
PEMERINTAHAN DAERAH
SIYASAH
DIGITAL GOVERNANCE
LINGKUNGAN

MALANG
2025





RAODMAP PENELITIAN

2025 - 2028

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum	3
C. Tujuan	6
D. Manfaat	7
BAB II ROADMAP PENELITIAN	11
A. Landasan Pengembangan Roadmap Penelitian	11
B. Arah Pengembangan Penelitian	13
C. Klaster Penelitian	14
D. Peta Roadmap Penelitian 2025-2026	16
E. Matrik Roadmap Penelitian 2025-2028	19
F. Integrasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa	20
G. Strategi Implementasi Roadmap.....	22
H. Target Luaran Penelitian	22
I. Orientasi Pengembangan Penelitian	23
BAB III PENUTUP	25

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025 - 2028 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti ajarannya.

Penyusunan Roadmap Penelitian Tahun 2025 - 2028 merupakan bagian dari ikhtiar Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam membangun arah pengembangan penelitian yang sistematis, terukur, berkesinambungan, dan selaras dengan pengembangan keilmuan program studi. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat budaya akademik dan produktivitas penelitian di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Roadmap ini dirancang dengan memperhatikan karakteristik keilmuan Hukum Tata Negara dan Siyasah serta berbagai perkembangan hukum dan ketatanegaraan kontemporer. Arah penelitian dikembangkan melalui delapan klaster utama, yaitu Konstitusi dan Kelembagaan Negara; Politik Hukum dan Legislasi; Demokrasi, Pemilu dan Kepartaian; Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah; Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; Siyasah Dusturiyah; Digital Governance; serta Konstitusionalisme Lingkungan. Klaster tersebut diharapkan mampu menjadi ruang pengembangan penelitian yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika ketatanegaraan, transformasi teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Secara bertahap, Roadmap Penelitian 2025-2028 diarahkan melalui empat fase pengembangan, yaitu Pemetaan dan Penguatan Fondasi Keilmuan pada tahun 2025, Pengembangan dan Integrasi pada tahun 2026, Inovasi dan Kolaborasi pada tahun 2027, serta Hilirisasi dan Rekognisi pada tahun 2028. Tahapan tersebut menggambarkan komitmen program studi untuk mengembangkan penelitian dari proses identifikasi dan pemetaan persoalan menuju pengembangan konsep dan

model, penguatan inovasi dan kolaborasi, hingga pemanfaatan hasil penelitian yang memberikan dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam roadmap ini adalah penguatan integrasi penelitian dosen dan mahasiswa. Penelitian dosen diharapkan dapat dikembangkan sebagai penelitian payung yang menjadi ruang bagi pengembangan penelitian mahasiswa sesuai dengan klaster dan bidang kepakaran. Melalui pola tersebut, penelitian mahasiswa, termasuk skripsi, dapat menjadi bagian dari agenda penelitian yang lebih luas dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai luaran akademik berupa artikel ilmiah, buku dan monograf, *policy brief*, naskah akademik, Hak Kekayaan Intelektual, model tata kelola, rekomendasi kebijakan, serta publikasi bersama dosen dan mahasiswa.

Penyusunan roadmap ini tentu tidak dapat terlaksana tanpa dukungan, arahan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, atas nama Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Sl., atas arahan, dukungan, dan kebijakan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penguatan budaya penelitian dan peningkatan kualitas akademik di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., atas arahan, dukungan, fasilitasi, dan komitmen dalam mendorong pengembangan penelitian di lingkungan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya membangun penelitian yang berkualitas, produktif, kolaboratif, serta memiliki rekognisi pada tingkat nasional maupun internasional.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), tenaga kependidikan, mahasiswa, tim penyusun, serta semua pihak yang terlibat dan telah memberikan pemikiran, masukan, data, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan Roadmap Penelitian Tahun 2025–2028. Sinergi dan partisipasi seluruh pihak merupakan modal penting bagi keberhasilan implementasi roadmap ini pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Roadmap Penelitian ini merupakan dokumen yang perlu terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan,

perkembangan hukum dan ketatanegaraan, kebijakan pendidikan tinggi, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan pengembangan roadmap penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025–2028 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam membangun ekosistem penelitian yang integratif, inovatif, kolaboratif, dan berdampak. Semoga seluruh ikhtiar akademik yang dilakukan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Tata Negara dan Siyasah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan keadilan, serta terwujudnya kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 17 September 2025

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penelitian merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberian kontribusi nyata terhadap penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi, penelitian tidak hanya dipahami sebagai aktivitas akademik untuk menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kapasitas institusi, meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan penelitian yang memiliki kekhasan integrasi antara ilmu hukum, ilmu ketatanegaraan, dan nilai-nilai keislaman. Penelitian yang dikembangkan tidak hanya diarahkan pada pengkajian norma hukum positif, tetapi juga pada analisis terhadap praktik ketatanegaraan, dinamika politik hukum, tata kelola pemerintahan, demokrasi, hak asasi manusia, serta pemikiran siyasah yang relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer.

Penyusunan Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025–2028 merupakan bagian dari upaya membangun arah penelitian yang sistematis, terencana, berkelanjutan, dan memiliki orientasi jangka menengah. Roadmap penelitian diperlukan agar kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa tidak berjalan secara parsial, melainkan memiliki keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya serta berkontribusi terhadap pencapaian visi keilmuan program studi, Fakultas Syariah, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Secara normatif, penyusunan dan pelaksanaan Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025–2028 berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Dasar hukum yang menjadi pijakan penyusunan roadmap penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan landasan bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian integral dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia yang berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta perubahannya, sebagai landasan penguatan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
5. Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, sebagai dasar operasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, termasuk pengembangan dan pengelolaan penelitian pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
6. Peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan standar penelitian, proses penelitian, hasil penelitian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan penelitian, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang menjadi landasan pengembangan tridharma pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

8. Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai landasan penyelenggaraan dan pengembangan kelembagaan universitas, termasuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan penelitian.
9. Rencana Strategis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya kebijakan strategis yang berkaitan dengan penguatan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, kerja sama akademik, serta peningkatan reputasi institusi pada tingkat nasional maupun internasional.
10. Rencana Strategis Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama kebijakan pengembangan penelitian dalam rumpun ilmu syariah dan hukum serta peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa.
11. Dokumen visi, misi, tujuan, strategi, dan visi keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang menjadi dasar pengembangan karakter dan keunggulan akademik program studi.
12. Kebijakan dan pedoman penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, termasuk arah pengembangan penelitian, publikasi, inovasi, kekayaan intelektual, serta penguatan kolaborasi penelitian.

Keseluruhan dasar hukum tersebut menjadi pijakan bagi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam mengembangkan penelitian yang tidak hanya memenuhi standar akademik dan kelembagaan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan persoalan hukum serta ketatanegaraan. Roadmap penelitian memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen yang menjembatani kebijakan penelitian pada tingkat nasional, universitas, fakultas, dan program studi. Melalui roadmap ini diharapkan terbentuk kesinambungan antara kebijakan institusi dengan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa sehingga penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat.

B. Gambaran Umum

Perubahan sosial, politik, hukum, ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang berlangsung sangat cepat memberikan tantangan baru terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Perkembangan tersebut menyebabkan kajian Hukum Tata Negara tidak lagi terbatas pada pembahasan mengenai konstitusi dan lembaga negara secara formal, tetapi berkembang pada berbagai persoalan yang berhubungan dengan demokrasi, politik hukum, hak asasi manusia, pemerintahan daerah, kebijakan publik,

tata kelola pemerintahan, transformasi digital, lingkungan hidup, serta relasi antara negara dan warga negara. Pada saat yang sama, perkembangan masyarakat Muslim membutuhkan konstruksi pemikiran siyasah yang mampu merespons perubahan tersebut secara kontekstual. Nilai-nilai keislaman mengenai keadilan, kemaslahatan, amanah, musyawarah, persamaan, perlindungan hak, dan tanggung jawab kekuasaan memiliki relevansi untuk dikembangkan dalam dialog dengan prinsip negara hukum demokratis dan konstitusionalisme modern.

Kondisi tersebut menjadi ruang akademik yang strategis bagi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Posisi program studi yang berada pada lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memberikan karakter khusus dalam pengembangan penelitian, yaitu kemampuan mengintegrasikan perspektif hukum positif, teori ketatanegaraan, ilmu politik, dan khazanah siyasah dalam membaca serta memberikan solusi terhadap persoalan ketatanegaraan. Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) karena itu harus mampu bergerak pada dua dimensi. Pertama, dimensi pengembangan keilmuan yang berorientasi pada penguatan teori, konsep, dan metodologi dalam bidang Hukum Tata Negara dan Siyasah. Kedua, dimensi pemecahan masalah yang diarahkan untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap persoalan hukum, kebijakan, demokrasi, pemerintahan, dan kehidupan bernegara.

Dalam dimensi pengembangan keilmuan, penelitian diarahkan untuk memperkuat kajian mengenai konstitusi, teori negara, kelembagaan negara, politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, demokrasi dan pemilu, hak asasi manusia, kewarganegaraan, serta pemikiran politik dan ketatanegaraan Islam. Pengembangan kajian tersebut diperlukan agar Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) memiliki basis keilmuan yang kuat sekaligus karakter akademik yang dapat menjadi pembeda dengan program studi sejenis. Dalam dimensi pemecahan masalah, penelitian diarahkan pada berbagai persoalan aktual yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Persoalan kualitas regulasi, efektivitas kelembagaan negara, hubungan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan, kualitas demokrasi, partisipasi masyarakat, perlindungan hak konstitusional warga negara, transformasi digital pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan merupakan beberapa isu yang membutuhkan perhatian akademik.

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam kajian ketatanegaraan. Digitalisasi pelayanan publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penggunaan kecerdasan artifisial dalam pemerintahan, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta digitalisasi demokrasi memberikan ruang penelitian baru bagi Hukum Tata Negara. Transformasi tersebut memerlukan kerangka hukum dan tata kelola yang menjamin bahwa perkembangan teknologi tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Selain transformasi digital, persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim juga semakin memiliki dimensi konstitusional. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kebijakan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, keadilan ekologis, serta tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang merupakan isu yang dapat dikembangkan dalam perspektif Hukum Tata Negara maupun siyasah.

Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025–2028 disusun untuk mengakomodasi berbagai perkembangan tersebut. Roadmap ini menjadi instrumen untuk memetakan bidang penelitian prioritas serta mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa agar memiliki kesinambungan dan orientasi yang jelas. Periode 2025–2028 dirancang sebagai satu rangkaian pengembangan penelitian yang terdiri atas empat tahapan. Tahun 2025 diarahkan pada pemetaan dan penguatan fondasi keilmuan. Tahun 2026 diarahkan pada pengembangan dan integrasi keilmuan. Tahun 2027 diarahkan pada inovasi dan kolaborasi penelitian, sedangkan tahun 2028 diarahkan pada hilirisasi hasil penelitian dan penguatan rekognisi.

Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan berkembang dari kajian dasar dan pemetaan persoalan menuju penelitian yang menghasilkan model, konsep, inovasi, dan rekomendasi kebijakan. Pada tahap akhir, hasil penelitian diharapkan tidak berhenti pada laporan penelitian atau publikasi akademik, tetapi dapat ditransformasikan menjadi policy brief, rekomendasi regulasi, buku referensi, kekayaan intelektual, model tata kelola, serta bentuk luaran lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Roadmap juga diarahkan untuk membangun budaya penelitian kolaboratif. Penelitian tidak semata-mata dilaksanakan secara individual, tetapi dikembangkan melalui kelompok atau klaster penelitian yang mempertemukan dosen, mahasiswa, peneliti dari perguruan tinggi lain, lembaga pemerintahan, serta mitra nasional dan internasional.

Keterlibatan mahasiswa menjadi bagian penting dari pengembangan budaya penelitian tersebut. Penelitian mahasiswa, terutama tugas akhir atau skripsi, diarahkan agar memiliki keterhubungan dengan tema-tema penelitian dosen. Dengan demikian, penelitian mahasiswa dapat menjadi bagian dari agenda penelitian program studi sekaligus memperkuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis dan bertanggung jawab. Roadmap ini pada akhirnya diharapkan dapat membangun ekosistem penelitian yang produktif. Ekosistem tersebut ditandai dengan meningkatnya penelitian kolaboratif, keterlibatan mahasiswa, publikasi ilmiah, buku dan monograf, kekayaan intelektual, policy brief, rekomendasi kebijakan, serta jejaring penelitian nasional dan internasional.

C. Tujuan

Penyusunan Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025–2028 secara umum bertujuan untuk memberikan arah strategis bagi pengembangan penelitian yang sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, roadmap penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menentukan arah dan prioritas penelitian program studi. Roadmap menjadi pedoman dalam menentukan bidang, tema, dan isu penelitian prioritas sehingga penelitian dosen dan mahasiswa memiliki arah yang jelas serta mendukung pengembangan keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
2. Memperkuat karakter keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penelitian diarahkan pada integrasi antara Hukum Tata Negara, teori dan praktik ketatanegaraan, serta siyasah sehingga menghasilkan karakter penelitian yang memiliki kekhasan akademik.
3. Membangun kesinambungan penelitian. Roadmap diarahkan agar penelitian tidak bersifat insidental dan terfragmentasi, tetapi berkembang secara bertahap dari penelitian dasar, pengembangan konsep, pengujian dan penerapan model, hingga hilirisasi hasil penelitian.
4. Mengintegrasikan penelitian dosen dan mahasiswa. Penelitian mahasiswa diarahkan agar terhubung dengan bidang kepakaran dan agenda penelitian dosen sehingga terbentuk ekosistem penelitian yang kolaboratif dan berkesinambungan.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah. Penelitian diarahkan untuk menghasilkan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta menghasilkan buku referensi, monograf, dan karya ilmiah lainnya.
6. Meningkatkan penelitian kolaboratif. Program studi mendorong penelitian lintas disiplin, lintas perguruan tinggi, serta kolaborasi dengan pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat, dan mitra internasional.
7. Meningkatkan relevansi dan dampak penelitian. Penelitian diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan kontribusi akademik, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan hukum dan ketatanegaraan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.
8. Mendorong hilirisasi hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, policy brief, naskah akademik, model tata kelola, kekayaan intelektual, dan produk penelitian lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
9. Mendukung peningkatan reputasi akademik program studi. Peningkatan kualitas penelitian, publikasi, kolaborasi, dan rekognisi diharapkan memperkuat posisi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tingkat nasional maupun internasional.
10. Mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Roadmap menjadi instrumen untuk menyelaraskan aktivitas penelitian program studi dengan arah pengembangan Fakultas Syariah dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan tujuan tersebut, roadmap penelitian tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen pengembangan akademik yang memberikan arah bagi seluruh sivitas akademika dalam membangun penelitian yang unggul, integratif, inovatif, dan berdampak.

D. Manfaat

Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025-2028 diharapkan memberikan manfaat secara akademik, institusional, dan sosial.

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, roadmap menjadi pedoman pengembangan bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan Siyasah. Keberadaan roadmap memungkinkan tema-tema penelitian dikembangkan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga dapat memperkuat bangunan keilmuan program studi. Roadmap juga memberikan ruang

bagi pengembangan pendekatan interdisipliner. Persoalan ketatanegaraan tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum normatif, tetapi membutuhkan dialog dengan ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan kajian Islam. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

2. Manfaat bagi Dosen

Bagi dosen, roadmap memberikan pedoman dalam menentukan arah penelitian sesuai bidang kepakaran masing-masing. Dosen dapat merancang penelitian secara bertahap dan berkelanjutan serta mengembangkan penelitian bersama mahasiswa dan mitra penelitian. Roadmap juga dapat menjadi dasar pembentukan kelompok riset yang memungkinkan dosen dengan bidang keahlian yang berdekatan untuk mengembangkan agenda penelitian bersama. Melalui kelompok riset tersebut dapat dibangun penelitian multi-tahun yang menghasilkan publikasi, buku, rekomendasi kebijakan, dan luaran akademik lainnya.

3. Manfaat bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, roadmap memberikan gambaran mengenai tema dan isu strategis yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir. Mahasiswa dapat memilih tema penelitian yang relevan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Integrasi penelitian mahasiswa dengan penelitian dosen juga memungkinkan terjadinya proses pembimbingan penelitian yang lebih sistematis. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam pengumpulan data, diskusi penelitian, seminar, penulisan artikel, hingga publikasi bersama sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

4. Manfaat bagi Program Studi

Bagi program studi, roadmap menjadi instrumen perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penelitian. Melalui roadmap, program studi dapat memetakan kepakaran dosen, tema penelitian, produktivitas publikasi, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi penelitian, serta pencapaian luaran penelitian. Data tersebut dapat dimanfaatkan dalam evaluasi dan pengembangan program studi, penjaminan mutu, akreditasi, penyusunan program kerja, serta pengembangan kerja sama akademik.

5. Manfaat bagi Fakultas dan Universitas

Roadmap penelitian program studi dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target penelitian Fakultas Syariah dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Produktivitas penelitian dan publikasi pada tingkat program studi merupakan bagian penting dalam membangun reputasi akademik fakultas dan universitas. Penelitian yang berkualitas dan memiliki dampak juga dapat memperkuat posisi universitas sebagai institusi pendidikan tinggi yang mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat

Bagi pemerintah dan masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kajian akademik, rekomendasi kebijakan, policy brief, naskah akademik, evaluasi regulasi, maupun model tata kelola pemerintahan. Kajian mengenai konstitusi, demokrasi, pemilu, pemerintahan daerah, politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, HAM, digital governance, dan berbagai persoalan ketatanegaraan lainnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif, demokratis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

7. Manfaat bagi Pengembangan Jejaring dan Rekognisi

Roadmap dapat menjadi dasar pengembangan jejaring penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pemerintahan, organisasi profesi, dan institusi lainnya di tingkat nasional maupun internasional. Kesamaan isu penelitian dapat dikembangkan menjadi penelitian bersama, seminar internasional, visiting researcher, pertukaran pengetahuan, serta publikasi kolaboratif. Melalui pengembangan jejaring tersebut, hasil penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) diharapkan memperoleh rekognisi yang semakin luas. Rekognisi tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui publikasi ilmiah, tetapi juga melalui pemanfaatan hasil penelitian sebagai referensi akademik maupun bahan perumusan kebijakan.

Pada akhirnya, Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025-2028 diharapkan mampu membangun arah penelitian yang konsisten dari pemetaan dan penguatan fondasi keilmuan pada tahun 2025, pengembangan dan integrasi pada tahun 2026, inovasi dan kolaborasi pada tahun 2027, hingga hilirisasi dan penguatan rekognisi pada tahun 2028. Kesenambungan tersebut menjadi fondasi bagi

terbangunnya budaya penelitian yang unggul, produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak. Dengan demikian, penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memberikan alternatif pemikiran dan solusi terhadap berbagai persoalan hukum, konstitusi, demokrasi, pemerintahan, dan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai keislaman.

BAB II

ROADMAP PENELITIAN TAHUN 2025 - 2028

A. Landasan Pengembangan Roadmap Penelitian

Roadmap penelitian merupakan dokumen strategis yang memberikan arah, tahapan, prioritas, dan target pengembangan penelitian dalam jangka waktu tertentu. Bagi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, roadmap penelitian memiliki posisi penting karena menjadi instrumen untuk menghubungkan visi keilmuan program studi dengan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa serta kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025–2028 didasarkan pada kebutuhan untuk membangun penelitian yang terarah, berkelanjutan, integratif, dan memiliki dampak. Penelitian tidak ditempatkan sebagai aktivitas akademik yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses pengembangan keilmuan, pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan reputasi akademik program studi.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, perkembangan persoalan ketatanegaraan semakin kompleks. Dinamika perubahan konstitusi, hubungan antarlembaga negara, kualitas demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, perlindungan hak konstitusional warga negara, transformasi digital pemerintahan, serta tantangan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa penelitian Hukum Tata Negara harus terus berkembang.

Pada sisi lain, karakter Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) menuntut adanya integrasi antara kajian Hukum Tata Negara modern dengan khazanah pemikiran politik dan ketatanegaraan Islam. Prinsip keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), musyawarah (al-syura), persamaan (al-musawah), amanah, tanggung jawab kekuasaan, perlindungan hak, dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai penting yang dapat dikembangkan dalam dialog dengan konsep negara hukum, demokrasi, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, pengembangan roadmap penelitian 2025–2028 didasarkan pada beberapa landasan utama.

Landasan filosofis penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) berpijak pada pemahaman bahwa ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Penelitian tidak hanya diarahkan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ketatanegaraan, kekuasaan negara pada hakikatnya harus dijalankan berdasarkan hukum dan ditujukan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Karena itu, penelitian Hukum Tata Negara harus mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem ketatanegaraan yang demokratis, konstitusional, berkeadilan, dan menjamin hak-hak warga negara. Perspektif siyasah memperkaya orientasi tersebut melalui nilai amanah, keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Integrasi antara prinsip konstitusionalisme dengan nilai-nilai siyasah menjadi salah satu basis filosofis pengembangan penelitian program studi.

Secara akademik, Hukum Tata Negara dan Siyasah merupakan bidang keilmuan yang dinamis. Perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lingkungan secara terus-menerus melahirkan persoalan baru yang membutuhkan respons keilmuan. Perkembangan tersebut menuntut penelitian yang tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mengembangkan pendekatan empiris, socio-legal, perbandingan hukum, konseptual, historis, politik hukum, dan interdisipliner. Dengan demikian, penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) diharapkan mampu mengembangkan teori sekaligus memberikan jawaban terhadap persoalan aktual.

Secara institusional, roadmap penelitian diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian juga menjadi salah satu indikator penting kualitas perguruan tinggi. Produktivitas penelitian, publikasi, sitasi, kolaborasi, kekayaan intelektual, buku, dan pemanfaatan hasil penelitian merupakan bagian dari indikator reputasi akademik institusi. Karena itu, roadmap penelitian harus mampu mengarahkan kegiatan penelitian agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas program studi sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis fakultas dan universitas.

Perubahan masyarakat menghasilkan berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan. Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan

perlindungan hak. Penelitian Hukum Tata Negara (Siyasah) harus mampu menangkap dinamika tersebut dan memberikan solusi berbasis kajian akademik. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada ruang akademik, tetapi memiliki hubungan dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi digital telah mengubah pola hubungan negara dan warga negara. Digitalisasi pelayanan publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kecerdasan artifisial, big data, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi menghadirkan isu ketatanegaraan baru. Program studi perlu menempatkan digital constitutionalism dan digital governance sebagai salah satu arah pengembangan penelitian agar kajian Hukum Tata Negara tetap responsif terhadap perkembangan zaman.

B. Arah Pengembangan Penelitian

Arah pengembangan penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025 - 2028 dirumuskan berdasarkan karakter keilmuan program studi, perkembangan persoalan ketatanegaraan, kebutuhan masyarakat, serta perubahan lingkungan strategis nasional dan global. Arah utama penelitian dirumuskan sebagai pengembangan Hukum Tata Negara dan Siyasah yang integratif, responsif, dan transformatif melalui penguatan konstitusionalisme, demokrasi, politik hukum, tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai siyasah untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah tersebut menempatkan penelitian dalam tiga orientasi. Yaitu :

1. Orientasi pengembangan keilmuan, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memperkuat teori, konsep, paradigma, dan metodologi Hukum Tata Negara dan Siyasah.
2. Orientasi pemecahan masalah, yaitu penelitian yang memberikan analisis dan solusi terhadap persoalan hukum, pemerintahan, demokrasi, politik hukum, hak konstitusional, dan kebijakan publik.
3. Orientasi dampak, yaitu penelitian yang menghasilkan luaran yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemangku kebijakan, seperti rekomendasi regulasi, policy brief, model kebijakan, naskah akademik, buku, dan kekayaan intelektual.

C. Klaster Penelitian

Klaster penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2025 - 2028 merujuk pada tema besar Roadmap Penelitian yaitu: "Pengembangan hukum tata negara dan siyasah berbasis integrasi keislaman, konstiusionalisme, dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan". Tema tersebut merupakan payung bagi seluruh kegiatan penelitian program studi selama periode 2025–2028. Tema besar ini selanjutnya dijabarkan dalam beberapa klaster penelitian, yaitu:

No.	Klaster Penelitian	Fokus/Kajian Utama	Arah/Target Penelitian
1	Konstitusi dan Kelembagaan Negara	Perkembangan konstiusionalisme Indonesia, perubahan dan amandemen konstitusi, desain kelembagaan negara, hubungan antarlembaga negara, sistem presidensial, checks and balances, kekuasaan kehakiman, judicial review, Mahkamah Konstitusi, lembaga negara independen, constitutional complaint, constitutional question, perbandingan konstitusi, perkembangan konstiusionalisme global.	Menghasilkan gagasan mengenai penguatan desain ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan konstiusional.
2	Politik Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Politik hukum nasional, konfigurasi politik dan pembentukan hukum, kualitas legislasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat, meaningful participation, omnibus legislation, evaluasi regulasi, regulatory impact assessment, disharmonisasi regulasi, politik hukum pemerintahan daerah, politik hukum	Menghasilkan rekomendasi bagi pembangunan sistem legislasi yang demokratis, partisipatif, responsif, dan berkeadilan.

		perlindungan kelompok rentan.	
3	Demokrasi, Pemilu, dan Kepartaian	Demokrasi konstitusional, sistem pemilu, pemilihan kepala daerah, partai politik, representasi politik, presidential threshold, parliamentary threshold, penyelesaian sengketa pemilu, politik uang, netralitas aparatur negara, partisipasi politik, demokrasi digital, kampanye digital, disinformasi politik.	Memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi substantif dan sistem pemilu yang berintegritas.
4	Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	Hubungan pemerintah pusat dan daerah, desentralisasi dan otonomi daerah, pembentukan daerah, kebijakan pemerintah daerah, peraturan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, inovasi pemerintahan daerah, pemerintahan desa, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, smart governance, partisipasi masyarakat.	Mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, efektif, responsif, inovatif, dan partisipatif.
5	Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan	Hak konstitusional warga negara, HAM dalam konstitusi, kewarganegaraan, kelompok rentan, hak perempuan dan anak, hak penyandang disabilitas, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, perlindungan minoritas, akses terhadap keadilan, hak digital, perlindungan data pribadi, hak atas lingkungan hidup.	Memperkuat negara hukum yang menghormati martabat manusia dan menjamin persamaan di hadapan hukum.
6	Siyasah	Siyasah dusturiyah, siyasah	Menghasilkan

	Dusturiyah dan Tata Kelola Pemerintahan Islam	syar'iyah, konsep kekuasaan dalam Islam, konsep negara dalam pemikiran politik Islam, keadilan dalam pemerintahan, syura dan demokrasi, masalah dan kebijakan publik, kepemimpinan, amanah kekuasaan, hubungan agama dan negara, maqashid al-syariah dalam kebijakan negara, pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer.	formulasi konseptual yang mempertemukan khazanah siyasah dengan perkembangan ketatanegaraan modern.
7	Digital Governance dan Transformasi Ketatanegaraan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, digital government, smart governance, artificial intelligence dalam pemerintahan, big data dan kebijakan publik, digital democracy, digital constitutionalism, keamanan siber, perlindungan data pribadi, algoritma dan keputusan pemerintahan, pelayanan publik digital, inklusi digital.	Mengembangkan kajian ketatanegaraan yang responsif terhadap transformasi digital dan perkembangan teknologi pemerintahan.
8	Konstitusionalisme Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan	Green constitution, ecological constitutionalism, hak atas lingkungan hidup, politik hukum lingkungan, kebijakan perubahan iklim, tata kelola sumber daya alam, keadilan ekologis, pembangunan berkelanjutan, ekoteologi, tanggung jawab negara terhadap lingkungan.	Mengintegrasikan konstitusionalisme, kebijakan publik, dan nilai Islam dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

D. Peta Roadmap Penelitian 2025 - 2028

Peta Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025–2028 disusun sebagai arah pengembangan penelitian yang sistematis, bertahap, integratif, dan

berorientasi pada dampak. Roadmap tersebut menggambarkan kesinambungan penelitian dalam empat tahapan utama, yaitu Pemetaan dan Penguatan Fondasi Keilmuan pada 2025, Pengembangan dan Integrasi pada 2026, Inovasi dan Kolaborasi pada 2027, serta Hilirisasi dan Rekognisi pada 2028. Setiap tahapan dirancang saling berkaitan sehingga hasil penelitian pada satu tahun menjadi fondasi bagi pengembangan penelitian pada tahun berikutnya. Seluruh tahapan menaungi delapan fokus utama penelitian, yaitu Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Politik Hukum dan Legislasi, Demokrasi, Pemilu dan Kepartaian, Pemerintahan Daerah, HAM dan Kewarganegaraan, Siyasah Dusturiyah, Digital Governance, serta Konstitusionalisme Lingkungan. Keragaman fokus tersebut menunjukkan keluasan ruang kajian Hukum Tata Negara sekaligus karakter keilmuan Siyasah yang menjadi kekhasan program studi. Penelitian dikembangkan dengan mempertemukan perspektif hukum positif, ketatanegaraan, siyasah, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan tersebut diarahkan agar penelitian tidak hanya menghasilkan penguatan teoretis, tetapi juga mampu merespons persoalan hukum dan ketatanegaraan yang berkembang di masyarakat. Roadmap juga menempatkan dosen dan mahasiswa sebagai bagian penting dalam pembentukan ekosistem penelitian program studi. Hasil penelitian secara bertahap diarahkan menuju publikasi, pengembangan model, rekomendasi kebijakan, dan rekognisi akademik. Dengan demikian, roadmap menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan penelitian Prodi HTN (Siyasah) menuju pengembangan keilmuan yang integratif dan berdampak.

Pada tahun 2025, penelitian berada pada tahap Pemetaan dan Penguatan Fondasi Keilmuan yang menitikberatkan pada identifikasi isu strategis, pemetaan kebutuhan, serta penguatan basis keilmuan Hukum Tata Negara dan Siyasah. Tahap ini menjadi fondasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persoalan hukum, konstitusi, demokrasi, pemerintahan, HAM, siyasah, transformasi digital, dan lingkungan. Kegiatan penelitian diarahkan pada pemetaan masalah dan kebutuhan masyarakat yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan program studi. Pemetaan tersebut diperkuat melalui studi literatur dan kajian terhadap regulasi yang berkaitan dengan masing-masing klaster penelitian. Program studi juga mengembangkan penyusunan database penelitian untuk mendokumentasikan isu, hasil penelitian, dan perkembangan kajian secara berkelanjutan. Seminar dan forum diskusi awal menjadi bagian dari proses untuk mempertemukan berbagai perspektif dan menemukan persoalan penelitian yang strategis. Hasil tahap pemetaan

diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara norma hukum, kebijakan, dan praktik ketatanegaraan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Luaran utama pada tahap ini berupa peta isu dan database penelitian, artikel ilmiah nasional, laporan kajian awal, serta buku referensi dasar. Luaran tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan penelitian yang lebih konseptual dan integratif pada periode berikutnya. Oleh karena itu, tahun 2025 berfungsi sebagai titik awal pembentukan fondasi penelitian yang kuat bagi keseluruhan implementasi roadmap 2025–2028.

Pada tahun 2026 dan 2027, roadmap bergerak dari tahap Pengembangan dan Integrasi menuju tahap Inovasi dan Kolaborasi. Tahun 2026 diarahkan pada pengembangan konsep dan model melalui integrasi Hukum Tata Negara, Siyasah, serta tata kelola pemerintahan. Penelitian pada tahap tersebut dikembangkan melalui penelitian tematik, pengembangan model, integrasi perspektif keislaman dan konstitusional, serta penguatan metodologi penelitian. Kolaborasi internal antara dosen dan mahasiswa juga menjadi bagian penting untuk menciptakan kesinambungan antara penelitian dosen dengan penelitian mahasiswa. Luaran yang ditargetkan meliputi artikel jurnal terakreditasi, model konseptual dan *policy brief*, monograf atau buku, serta naskah akademik. Selanjutnya, pada tahun 2027 orientasi penelitian ditingkatkan menuju inovasi, penelitian komparatif, serta penguatan jejaring penelitian nasional dan internasional. Penelitian kolaboratif nasional dan internasional menjadi instrumen untuk memperluas perspektif sekaligus meningkatkan kualitas hasil penelitian program studi. Studi perbandingan (*comparative research*) juga dikembangkan untuk mempertemukan pengalaman ketatanegaraan Indonesia dengan perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Inovasi layanan hukum berbasis digital serta forum ilmiah, *visiting researcher*, dan *joint publication* menjadi bagian dari strategi pengembangan jejaring akademik. Tahap 2027 ditargetkan menghasilkan artikel jurnal internasional, publikasi bersama dosen-mahasiswa, model tata kelola atau inovasi kebijakan, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada tahun 2028, roadmap memasuki tahap Hilirisasi dan Rekognisi, yaitu pemanfaatan hasil penelitian untuk kebijakan, penguatan dampak, dan peningkatan pengakuan akademik. Penelitian pada tahap ini tidak lagi hanya berorientasi pada produksi pengetahuan, tetapi diarahkan agar temuan penelitian dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum dan ketatanegaraan. Pengembangan dan perluasan model menjadi salah satu strategi agar hasil penelitian yang telah dihasilkan pada

tahap sebelumnya memiliki jangkauan manfaat yang lebih luas. Advokasi kebijakan pada tingkat daerah maupun nasional dilakukan melalui transformasi temuan penelitian menjadi rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Program studi juga diarahkan untuk mengembangkan pusat kajian atau *center of excellence* sebagai wadah konsolidasi kepakaran dan pengembangan penelitian unggulan.

Diseminasi hasil penelitian menjadi instrumen penting untuk memperluas pemanfaatan pengetahuan sekaligus meningkatkan rekognisi program studi. Luaran utama pada tahap ini mencakup *policy brief* dan rekomendasi kebijakan, model regulasi dan tata kelola, buku referensi atau monograf, pengakuan nasional dan internasional, serta hilirisasi hasil penelitian. Keseluruhan proses tersebut diarahkan pada hadirnya solusi atas persoalan hukum dan ketatanegaraan, rekomendasi kebijakan dan regulasi, serta model tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dampak akhirnya adalah meningkatnya rekognisi akademik nasional dan internasional serta kontribusi program studi dalam mewujudkan masyarakat berdaya dan negara berkeadilan. Dengan demikian, keseluruhan Roadmap Penelitian Prodi HTN (Siyasah) 2025–2028 merepresentasikan komitmen terhadap “Penelitian untuk Hukum, Keadilan, dan Kemaslahatan Umat.”



E. Matriks Roadmap Penelitian 2025–2028

Matriks roadmap penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 2025 – 2028 merujuk pada peta penelitian yang tujuh klaster penelitian yang dirumuskan berdasarkan peta dan struktur keilmuan pengembangan Program Studi Hukum

Tata Negara yang tertuang dalam struktur kurikulum. Adapun matrik roadmap penelitian tahun 2025 – 2028 yaitu:



F. Integrasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Integrasi penelitian dosen dan mahasiswa merupakan strategi penting dalam pelaksanaan Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) untuk membangun ekosistem penelitian yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan. Integrasi ini menempatkan penelitian dosen sebagai penelitian payung yang dikembangkan berdasarkan klaster dan bidang kepakaran, sedangkan penelitian mahasiswa diarahkan menjadi bagian dari tema-tema tersebut. Dengan pola ini, penelitian mahasiswa, khususnya skripsi, tidak berjalan secara parsial, tetapi memiliki keterkaitan dengan agenda penelitian program studi. Tema penelitian mahasiswa dapat diturunkan dari persoalan yang lebih spesifik dalam penelitian dosen, baik dalam bidang konstitusi dan kelembagaan negara, politik hukum dan legislasi, demokrasi dan pemilu, pemerintahan daerah, HAM dan kewarganegaraan, siyasah dusturiyah, digital governance, maupun konstitusionalisme lingkungan. Pola tersebut sekaligus memperkuat hubungan antara proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Integrasi penelitian juga diarahkan pada pembentukan kelompok riset dosen dan mahasiswa berdasarkan kesamaan minat dan bidang kajian. Mahasiswa dapat dilibatkan secara proporsional dalam berbagai tahapan penelitian, mulai dari kajian literatur, pemetaan peraturan perundang-undangan, pengumpulan dan pengolahan data, diskusi hasil penelitian, seminar, hingga penyusunan publikasi ilmiah. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman penelitian yang lebih kuat kepada mahasiswa sekaligus meningkatkan kualitas akademik tugas akhirnya. Bagi dosen, kolaborasi dengan mahasiswa dapat memperluas cakupan penelitian dan memperkuat kesinambungan agenda riset sesuai bidang kepakaran. Dengan demikian, proses pembimbingan akademik dapat berkembang menjadi proses pendampingan penelitian yang produktif dan berorientasi pada luaran.

Dalam konteks Roadmap Penelitian 2025–2028, integrasi dosen dan mahasiswa dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2025 diarahkan pada pemetaan tema, minat penelitian mahasiswa, dan kepakaran dosen; tahun 2026 diarahkan pada pengembangan penelitian tematik dan kolaborasi internal dosen-mahasiswa; tahun 2027 diarahkan pada penelitian kolaboratif, pengembangan inovasi, dan publikasi bersama; sedangkan tahun 2028 diarahkan pada hilirisasi hasil penelitian dan peningkatan rekognisi. Luaran kolaborasi dapat dikembangkan dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi maupun internasional, buku atau monograf, *policy brief*, naskah akademik, model tata kelola, rekomendasi kebijakan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Pola tersebut mendukung arah roadmap dari tahap pemetaan menuju pengembangan, inovasi, hilirisasi, dan rekognisi.

Secara konseptual, integrasi tersebut dapat dirumuskan dalam alur Roadmap Penelitian Prodi, yaitu:



Melalui pola ini, penelitian dosen dan mahasiswa menjadi satu kesatuan dalam pengembangan keilmuan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa, produktivitas

penelitian dosen, publikasi bersama, serta relevansi penelitian dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan. Pada akhirnya, kolaborasi dosen dan mahasiswa menjadi salah satu instrumen untuk membangun budaya akademik yang produktif serta memperkuat karakter penelitian Prodi HTN (Siyasah) yang integratif, inovatif, kolaboratif, dan berdampak.

G. Strategi Implementasi Roadmap

Pelaksanaan roadmap memerlukan strategi yang sistematis.

1. Pembentukan Klaster atau Kelompok Riset. Program studi mendorong pembentukan kelompok riset berdasarkan delapan klaster penelitian yang telah ditetapkan. Setiap kelompok riset dapat terdiri atas beberapa dosen dan mahasiswa dengan bidang penelitian yang relevan.
2. Penguatan Kapasitas Peneliti. Penguatan kapasitas dilakukan melalui workshop metodologi penelitian, academic writing, pengelolaan referensi, analisis data, penelitian socio-legal, comparative law, dan publikasi internasional.
3. Pengembangan Penelitian Kolaboratif. Kolaborasi dikembangkan pada tingkat internal maupun eksternal. Kolaborasi internal melibatkan dosen dan mahasiswa, sedangkan kolaborasi eksternal dikembangkan dengan perguruan tinggi dan lembaga lain.
4. Penguatan Publikasi. Setiap penelitian diarahkan menghasilkan publikasi yang terukur.
5. Publikasi dapat berupa artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi, prosiding, buku, dan monograf.
6. Penguatan Hilirisasi. Hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap kebijakan diarahkan menjadi policy brief, rekomendasi regulasi, naskah akademik, atau model kebijakan.

H. Target Luaran Penelitian

Luaran penelitian periode 2025 - 2028 diarahkan pada:

1. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi;
2. Artikel Jurnal Internasional;
3. Artikel Jurnal Internasional Bereputasi;
4. Buku Referensi;
5. Monograf;

6. Prosiding Ilmiah;
7. Hak Kekayaan Intelektual;
8. Policy Brief;
9. Naskah Akademik;
10. Rekomendasi Kebijakan;
11. Model Tata Kelola Pemerintahan;
12. Model Regulasi;
13. Database Penelitian;
14. Publikasi Bersama Dosen Dan Mahasiswa;
15. Penelitian Kolaboratif Nasional;
16. Penelitian Kolaboratif internasional.

Luaran tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah, tetapi juga kualitas, relevansi, pemanfaatan, dan dampaknya.

I. Orientasi Pengembangan Penelitian

Roadmap penelitian 2025-2028 tidak ditempatkan sebagai agenda yang berakhir pada tahun 2028. Periode tersebut merupakan fondasi bagi pengembangan penelitian jangka panjang Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Hasil penelitian periode 2025-2028 perlu dikonsolidasikan untuk menentukan agenda penelitian pada periode berikutnya. Konsolidasi dilakukan dengan mengidentifikasi tema penelitian yang telah matang, tema yang masih membutuhkan pengembangan, persoalan baru yang muncul, serta bidang penelitian yang memiliki potensi memperoleh rekognisi nasional maupun internasional.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai konstitusionalisme digital, kecerdasan artifisial dan pemerintahan, demokrasi digital, constitutional environmentalism, tata kelola pemerintahan berkelanjutan, perlindungan kelompok rentan, serta perkembangan pemikiran siyasah kontemporer memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai agenda penelitian lanjutan. Pengembangan tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan kelompok riset yang produktif, penguatan kerja sama, dan peningkatan akses terhadap pendanaan penelitian.

Program studi juga perlu mendorong terbentuknya basis data penelitian yang mendokumentasikan seluruh hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Basis data tersebut dapat digunakan untuk memetakan perkembangan penelitian, menghindari

duplikasi tema, mengidentifikasi bidang kepakaran dosen, serta menemukan peluang penelitian lanjutan. Pada saat yang sama, hasil penelitian perlu semakin diintegrasikan dengan proses pembelajaran. Temuan-temuan penelitian dosen dapat digunakan sebagai bahan ajar, studi kasus, referensi perkuliahan, dan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester. Dengan pola tersebut, terdapat hubungan yang kuat antara penelitian dan pendidikan. Integrasi juga perlu dikembangkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Temuan penelitian mengenai persoalan hukum, demokrasi, pemerintahan, pelayanan publik, hak warga negara, dan tata kelola dapat ditransformasikan menjadi program pemberdayaan, pendidikan hukum, pendampingan masyarakat, dan penguatan kapasitas pemerintahan.

Melalui Roadmap Penelitian Tahun 2025–2028, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) diharapkan mampu membangun budaya penelitian yang tidak hanya produktif secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, memiliki kekhasan keilmuan, responsif terhadap perkembangan zaman, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Keseluruhan agenda penelitian pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat posisi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lingkungan akademik yang mampu mengembangkan kajian Hukum Tata Negara dan Siyasah secara integratif, menghasilkan penelitian yang inovatif dan relevan, membangun kolaborasi nasional dan internasional, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya tata kehidupan bernegara yang demokratis, konstitusional, adil, maslahat, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

Roadmap Penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025 - 2028 diharapkan menjadi pedoman bersama dalam membangun tata kelola penelitian yang terarah, terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan. Keberadaan roadmap memberikan kepastian arah bagi pengembangan penelitian sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat keterhubungan antara penelitian, pendidikan, publikasi, hilirisasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan roadmap membutuhkan komitmen akademik yang kuat dari seluruh sivitas akademika. Dosen memiliki peran strategis dalam mengembangkan penelitian berdasarkan bidang kepakaran dan membangun payung penelitian, sedangkan mahasiswa menjadi bagian dari proses regenerasi dan pengembangan budaya riset. Program studi berperan dalam memastikan agar seluruh kegiatan tersebut bergerak dalam arah yang sama dan mendukung penguatan keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Melalui tahapan Pemetaan dan Penguatan Fondasi Keilmuan, Pengembangan dan Integrasi, Inovasi dan Kolaborasi, Hilirisasi dan Rekognisi, diharapkan terbentuk siklus penelitian yang terus berkembang dan berkelanjutan. Siklus tersebut pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas keilmuan, publikasi yang berkualitas, kolaborasi yang semakin luas, rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan, serta hasil penelitian yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Dengan demikian, Roadmap Penelitian Tahun 2025 - 2028 menjadi manifestasi komitmen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menghadirkan penelitian yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus berpijak pada nilai keilmuan dan kemaslahatan. Keseluruhan agenda tersebut diarahkan pada satu orientasi utama, yaitu mengembangkan pengetahuan yang relevan, membangun tata kelola yang berkualitas, memberdayakan masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan semangat tersebut, penelitian Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) diharapkan terus berkembang sebagai penelitian untuk hukum, keadilan, dan kemaslahatan umat.